

Peningkatan Kompetensi Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara Universitas Bosowa Dalam Membaca Dan Menganalisis Anggaran Daerah

Saldi Julianto¹, Muh Amirul Ichsan², Ummu Amaliyah³, Irwan Alim⁴

¹²³ Universitas Muhammadiyah Makassar

E-mail: saldijulianto12@gmail.com

Abstract

This study is entitled "Improving the Competence of Public Administration Students at Bosowa University in Reading and Analyzing Regional Budgets" and aims to improve students' understanding of regional budget analysis and reading. With a better understanding, students are expected to be able to apply this knowledge in the world of work, both in the government sector and in other fields related to public policy. More than just academic interests, this study also emphasizes the role of students as agents of change who can contribute to overseeing transparency and accountability in regional budget management. Students are expected to be critical supervisors of budget policies and play an active role in educating the public about the importance of good regional financial governance. The research was carried out through a series of trainings that included presentations of materials using PowerPoint by speakers, interactive discussions, group budget analysis practices, and evaluation sessions to measure students' understanding after participating in the training. The results of the study showed that most students still had limitations in understanding various aspects of the regional budget, including the budget cycle, sources of regional income and expenditure, and the concept of planning and budgeting. Students also had difficulty in systematically compiling the regional budget cycle from January to December. These findings indicate the need for a more in-depth and applied learning approach so that students can be more skilled in reading, understanding, and analyzing regional budgets comprehensively.

Kata kunci: Competency Improvement; Regional Budget; Analysis

Abstrak

Penelitian ini berjudul "Peningkatan Kompetensi Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara Universitas Bosowa dalam Membaca dan Menganalisis Anggaran Daerah" dan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai analisis serta pembacaan anggaran daerah. Dengan pemahaman yang lebih baik, mahasiswa diharapkan mampu mengaplikasikan pengetahuan ini dalam dunia kerja, baik di sektor pemerintahan maupun di bidang lainnya yang berkaitan dengan kebijakan publik. Lebih dari sekadar kepentingan akademis, penelitian ini juga menekankan peran mahasiswa sebagai agen perubahan yang dapat berkontribusi dalam mengawal transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah. Mahasiswa diharapkan mampu menjadi pengawas yang kritis terhadap kebijakan anggaran dan berperan aktif dalam mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya tata kelola keuangan daerah yang baik. Pelaksanaan penelitian dilakukan melalui serangkaian pelatihan yang mencakup pemaparan materi menggunakan PowerPoint oleh pemateri, diskusi interaktif, praktik analisis anggaran secara berkelompok, serta sesi evaluasi untuk mengukur pemahaman mahasiswa setelah mengikuti pelatihan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa masih

memiliki keterbatasan dalam memahami berbagai aspek anggaran daerah, termasuk siklus anggaran, sumber pendapatan dan belanja daerah, serta konsep perencanaan dan penganggaran. Mahasiswa juga mengalami kesulitan dalam menyusun siklus anggaran daerah secara sistematis dari Januari hingga Desember. Temuan ini menunjukkan perlunya pendekatan pembelajaran yang lebih mendalam dan aplikatif agar mahasiswa dapat lebih terampil dalam membaca, memahami, serta menganalisis anggaran daerah secara komprehensif.

Kata kunci: Peningkatan Kompetensi; Anggaran daerah; Analisis

PENDAHULUAN

Sejak terjadinya reformasi pada tahun 1998, Indonesia mengalami perubahan yang sangat signifikan. Masyarakat menuntut perbaikan di berbagai bidang, salah satu hasilnya adalah penguatan demokrasi. Tidak mengherankan jika kemudian lahir otonomi daerah sebagai wujud runtuhnya sistem sentralisasi. Otonomi daerah merupakan suatu sistem pemerintahan desentralisasi, di mana setiap daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri pelaksanaan pemerintahan. Kebijakan otonomi daerah pada dasarnya bertujuan untuk mendorong peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara lebih efektif dan efisien. Namun, dalam perjalanannya, pelaksanaan pemerintahan secara otonomi tidaklah berjalan mulus. Hal ini terlihat dari banyaknya kasus korupsi yang menjerat sejumlah oknum pejabat pemerintah daerah yang memanfaatkan kelemahan sistem desentralisasi. Kondisi ini tentu sangat memprihatinkan, karena bagaimana mungkin pemerintahan yang baik dapat terselenggara jika praktik korupsi terjadi secara sistematis dari tingkat pimpinan hingga bawahan. Penerapan otonomi daerah diharapkan dapat menciptakan kemandirian daerah yang mampu mendorong pertumbuhan, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat setempat. Oleh karena itu, diperlukan aparatur pemerintah yang cakap dan terampil dalam menjalankan tugas pemerintahan serta pembangunan, baik sebagai perencana maupun pelaksana kebijakan. Di sisi lain, masih terdapat tanda tanya besar di kalangan profesi audit internal mengenai sejauh mana peran pengawasan, termasuk pejabat pengawas di Inspektorat Daerah, baik di tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota. Hal ini terutama terkait dengan upaya mereka dalam mengawal berbagai kegiatan dan program pemerintah daerah agar sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan (Syam, Suratno, and Djaddang 2021). Oleh karena itu, pengawasan terhadap pengelolaan APBD yang dilakukan oleh DPRD merupakan hak setiap anggota DPRD dalam rangka memperjuangkan kepentingan masyarakat.

Dalam pelaksanaan APBD, agar tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan anggaran, diperlukan pengawasan yang kuat. Pengawasan DPRD terhadap APBD tidak hanya terbatas pada penggunaan anggaran, tetapi juga mencakup sisi pemasukan dan pendapatan. Basniawati dalam (Mustofa et al. 2024) menyatakan bahwa peran pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan bertujuan untuk mendeteksi secara dini berbagai penyimpangan yang mungkin terjadi. Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pengelolaan daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, kegiatan pengawasan juga menjadi upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Pembangunan yang dimaksud meliputi realisasi program dan anggaran di semua sektor pembangunan kehidupan masyarakat (Anwar and S 2022).

Berangkat dari pandangan tersebut, fungsi pengawasan patut mendapat perhatian demi terselenggaranya pemerintahan yang baik. Mekanisme pengawasan yang dilaksanakan oleh DPRD terhadap pelaksanaan APBD direalisasikan melalui tugas dan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 secara jelas mengatur hak-hak DPRD dalam Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 44 ayat (1). Hak-hak tersebut meliputi hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat (Sunarto 2018). Undang-undang ini memberikan kewenangan luas kepada pemerintah daerah untuk memanfaatkan potensi daerah guna kepentingan rakyat.

Anggaran daerah merupakan instrumen yang menghubungkan proses perencanaan dan pengendalian. Sebagai alat pengendalian, anggaran menyediakan rencana detail mengenai pengeluaran pemerintah agar setiap belanja yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik (Riwukore, Habaora, and Terttiaavini 2022). Anggaran daerah juga dapat diartikan sebagai rencana keuangan daerah dalam satu tahun, mencakup pengeluaran serta sumber pendapatan (Hutagalung 2016). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berfungsi sebagai alat peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab.

Menurut Mardiasmo dalam (Simanjuntak 2015), APBD merupakan instrumen kebijakan utama bagi pemerintah daerah. Sebagai instrumen kebijakan, anggaran daerah memainkan peran sentral dalam meningkatkan kapabilitas dan efektivitas pemerintahan. Anggaran berfungsi untuk menentukan besaran pendapatan dan pengeluaran, mendukung pengambilan keputusan serta perencanaan pembangunan, mengotorisasi pengeluaran di masa mendatang, mengembangkan ukuran evaluasi kinerja, memotivasi pegawai, dan mengoordinasikan berbagai aktivitas unit kerja.

Halim dan Kusufi dalam (Sari and Palupi 2014) menjelaskan bahwa anggaran memiliki beberapa fungsi utama, yaitu sebagai alat perencanaan, alat pengendalian, alat kebijakan fiskal, alat politik, alat koordinasi dan komunikasi, alat penilaian kinerja, alat motivasi, serta sarana menciptakan ruang publik. Anggaran belanja adalah rencana yang menggambarkan perkiraan kegiatan yang akan dilakukan di masa mendatang. Setiap anggaran belanja menjabarkan secara spesifik rencana kerja unit organisasi dalam suatu periode tertentu.

Mardiasmo mengemukakan bahwa sistem penyusunan anggaran merupakan konsekuensi logis dari pelaksanaan otonomi daerah yang mengakibatkan perubahan dalam manajemen keuangan daerah. Salah satu aspek utama reformasi anggaran (budgeting reform) adalah pergeseran dari sistem anggaran tradisional ke sistem anggaran berbasis kinerja (performance budgeting). Namun, masih banyak daerah yang menerapkan incremental budgeting, yakni penyusunan anggaran berdasarkan realisasi tahun sebelumnya tanpa perubahan mendasar. Hal ini sering kali tidak selaras dengan kebutuhan riil dan kepentingan masyarakat (Sari and Palupi 2014).

Anggaran merupakan aspek vital dalam pembangunan daerah. Namun, pengelolaan anggaran masih sering tidak tepat sasaran atau gagal mencapai tujuan yang diharapkan. Lambatnya penyerapan anggaran di pemerintahan daerah menjadi masalah klasik yang terus berulang. Biasanya, penyerapan anggaran pada triwulan pertama sangat kecil, tetapi meningkat drastis pada triwulan keempat. Akibatnya, pelaksanaan program pemerintah menjadi lambat (Yuniati and Anne Putri 2023). Kegagalan dalam mencapai target penyerapan anggaran mengakibatkan dana yang dialokasikan tidak sepenuhnya dimanfaatkan, yang berarti terdapat dana menganggur (idle money). Jika anggaran dikelola secara efisien, keterbatasan sumber dana negara dapat dioptimalkan untuk mendanai kegiatan strategis.

Efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran daerah dapat dievaluasi melalui laporan realisasi anggaran. Laporan ini membandingkan anggaran dengan realisasi dalam periode pelaporan tertentu, dengan tujuan menyajikan informasi tentang penggunaan anggaran secara transparan (Karim & Sahabuddin dalam P. Sari & Baku, 2022). Laporan realisasi anggaran mencakup beberapa komponen, yaitu: (1) pendapatan, (2) transfer, (3) belanja, (4) defisit, (5) penerimaan pembiayaan, (6) pengeluaran pembiayaan, (7) pembiayaan bersih, serta (8) sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran (SILPA/SiKPA) (P. Sari & Baku, 2022).

Anggaran daerah merupakan elemen yang tidak terpisahkan dari perencanaan organisasi. Oleh karena itu, anggaran harus dirancang secara optimal agar seluruh rencana dapat direalisasikan dan dipertanggungjawabkan. Anggaran yang efektif memerlukan prediksi terhadap faktor internal dan eksternal. Selain sebagai alat perencanaan dan pengendalian, anggaran juga berfungsi untuk mengarahkan organisasi agar tetap berada dalam posisi yang kuat. Dengan demikian, anggaran dapat digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasarannya. Selain itu, anggaran juga berperan sebagai alat motivasi bagi pimpinan dan karyawan untuk bertindak lebih efisien dalam mencapai tujuan organisasi (Yuniarti 2020).

Namun, dalam pengelolaan APBD diperlukan kerangka kerja yang terpadu dan optimal untuk menciptakan tata kelola anggaran yang sesuai dengan prinsip "Good and Clean Governance". Tujuannya adalah agar pengelolaan anggaran dilakukan secara transparan dan partisipatif, sehingga menghasilkan pemerintahan daerah yang bersih, profesional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Pasal 23 UUD 1945 menegaskan bahwa rakyat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam penyusunan dan pengambilan keputusan anggaran. Hal ini diperkuat dengan Undang-Undang Keuangan Negara No. 17 Tahun 2003 serta SEB Mendagri-Bappenas, yang menekankan pentingnya penganggaran partisipatif (Participatory Budgeting). Participatory Budgeting (PB) merupakan inovasi kebijakan yang melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan anggaran (Nurakhmadi, Rahmawan, and Suhendro 2024).

Menurut UNDP, terdapat sembilan prinsip good governance, yaitu: (1) partisipasi, (2) kepatuhan terhadap hukum (rule of law), (3) transparansi, (4) responsivitas, (5) orientasi konsensus, (6) kesetaraan, (7) efektivitas dan efisiensi, (8) akuntabilitas, serta (9) visi strategis. Keberhasilan anggaran sangat bergantung pada dukungan manajemen tingkat atas, kerja sama antarpemimpin, serta kejelasan wewenang di setiap tingkatan organisasi. Laporan keuangan yang berkualitas mencerminkan kesesuaian informasi keuangan yang disajikan dengan standar akuntansi yang berlaku. Laporan yang baik memberikan informasi yang dapat diandalkan untuk



pengambilan keputusan (Saraswati 2021). Oleh karena itu, dalam pelaksanaan kegiatan ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menganalisis anggaran daerah, sehingga dapat menerapkan pengetahuan tersebut di dunia kerja. Mahasiswa tidak hanya berperan dalam konteks akademik, tetapi juga sebagai agen kontrol sosial yang mengkritisi pembagian anggaran di daerah.

Gambar 1: analisis penelitian terdahulu

Sumber diolah penulis 2025

Berdasarkan gambar yang ditampilkan, dapat dianalisis bahwa penelitian terdahulu terkait peran mahasiswa dalam menganalisis anggaran daerah menunjukkan perkembangan dari tahun ke tahun dengan berbagai kontribusi yang berbeda. Dalam penelitian sebelumnya, (Yuyud Susilo 2020) menjadi bagian dari awal kajian yang membahas bagaimana mahasiswa memahami siklus anggaran daerah. Penelitian selanjutnya oleh (Hertati 2021) mulai mengembangkan kajian lebih mendalam mengenai efektivitas partisipasi mahasiswa dalam pengawasan dan analisis belanja daerah. Tren penelitian ini semakin meningkat dengan adanya kontribusi dari beberapa peneliti pada tahun 2023, seperti (Rahmawati 2023), (Zhafiri and Trisaningsih 2023), (Kurniawan and Fridiyanti 2023), (Nasir et al. 2023), (Abbas, Hamzah, and Didiharyono 2023), dan (Tameon, Rafael, and Ga 2023), yang menunjukkan bahwa peran mahasiswa semakin dipertimbangkan dalam kajian akademik mengenai transparansi dan akuntabilitas anggaran daerah. Dominasi penelitian tahun 2023 menegaskan bahwa isu ini masih menjadi perhatian utama, sejalan dengan upaya peningkatan kompetensi mahasiswa dalam memahami proses perencanaan, penganggaran, serta pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah. Hal ini menegaskan bahwa penelitian terbaru semakin menitikberatkan pada peningkatan peran aktif mahasiswa dalam menganalisis serta mengawal tata kelola keuangan daerah agar lebih transparan dan akuntabel. Penelitian diatas menjadi rujukan peneliti dalam berusaha melihat dan menganalisis terkait dengan “Peningkatan Kompetensi Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara Universitas Bosowa Dalam Membaca Dan Menganalisis Anggaran Daerah”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sekaligus mendukung peningkatan kompetensi mahasiswa Ilmu Administrasi Negara Universitas Bosowa dalam memahami serta menganalisis anggaran daerah. Melalui pendekatan forum group discussion, mahasiswa diberikan kesempatan untuk terlibat secara langsung dalam diskusi dan kajian mendalam mengenai siklus anggaran, alokasi pendapatan, serta belanja daerah. Metode ini tidak hanya mendorong pemahaman teoritis, tetapi juga memperkuat keterampilan praktis mahasiswa dalam menelaah kebijakan anggaran yang diterapkan oleh pemerintah daerah. Interaksi tatap muka dengan pihak pemerintah memberikan wawasan yang lebih komprehensif mengenai tantangan dan dinamika dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana efektif dalam meningkatkan kualitas akademik dan profesionalisme mahasiswa sebagai calon analis kebijakan publik yang berkompeten dan berorientasi pada transparansi serta akuntabilitas keuangan daerah.

METODE

Pelatihan peningkatan kompetensi mahasiswa dalam membaca dan menganalisis anggaran daerah dilaksanakan di Auditorium Aksa Mahmud, Universitas Bosowa, secara offline selama dua hari, yaitu pada tanggal 21–22 November 2022. Kegiatan ini diikuti oleh 30 mahasiswa dari jurusan Ilmu Administrasi Negara angkatan 2019, 2020, dan 2022. Pelaksanaan kegiatan diawali dengan sambutan dari Ketua Program Studi Ilmu

Administrasi Negara, yang kemudian dilanjutkan dengan pembukaan resmi oleh Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa. Metode yang digunakan dalam pelatihan ini mencakup beberapa tahapan yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa secara bertahap dan interaktif. Tahap pertama adalah pemaparan materi oleh pemateri menggunakan presentasi *PowerPoint* yang menjelaskan konsep dasar, mekanisme, serta teknik membaca dan menganalisis anggaran daerah. Selanjutnya, mahasiswa dibagi ke dalam beberapa kelompok untuk menerapkan metode tutorial dan praktik, di mana mereka menyusun tahapan pendapatan daerah serta siklus anggaran daerah berdasarkan materi yang telah diberikan. Setelah praktik, dilakukan diskusi kelompok yang berbentuk *Focus Group Discussion (FGD)*. Dalam sesi ini, masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerja mereka menggunakan kertas plano dan menyampaikannya kepada kelompok lain. *FGD* memungkinkan mahasiswa untuk berinteraksi, bertukar pemikiran, serta mempertajam analisis mereka melalui umpan balik dari peserta lain dan pemateri. Sebagai tahap akhir, dilakukan evaluasi untuk mengukur pemahaman mahasiswa. Pemateri menguji apakah jawaban yang disusun oleh masing-masing kelompok telah sesuai dengan konsep yang benar. Evaluasi ini tidak hanya bertujuan untuk menilai hasil belajar, tetapi juga untuk memberikan kesempatan bagi mahasiswa memperbaiki pemahaman mereka terhadap penyusunan dan analisis anggaran daerah secara lebih komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan pelatihan diawali dengan pretest yang bertujuan untuk mengukur tingkat pemahaman dan pengetahuan mahasiswa Ilmu Administrasi Negara Universitas Bosowa terkait dengan perencanaan dan penganggaran daerah. Selain itu, pretest ini juga digunakan untuk menilai sejauh mana mahasiswa memahami keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (*RPJMDes*) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (*RPJMD*).

Pelatihan ini berlangsung selama dua hari, yakni pada tanggal 21–22 November 2022 di Auditorium Aksa Mahmud Universitas Bosowa. Setelah pretest, peserta diberikan materi awal mengenai hakikat anggaran. Materi ini menekankan bahwa anggaran memiliki peran penting dalam menjamin hak-hak rakyat, menciptakan kesejahteraan masyarakat, serta membiayai pelayanan publik. Pemahaman ini menjadi dasar bagi mahasiswa dalam memahami bagaimana anggaran harus dikelola secara transparan dan akuntabel untuk kepentingan masyarakat.

Selanjutnya, peserta diberikan materi mengenai regulasi perencanaan dan penganggaran daerah. Pada sesi ini, mahasiswa diberikan wawasan mengenai siklus perencanaan dan penganggaran, termasuk pengenalan terhadap berbagai dokumen perencanaan dan penganggaran daerah. Dalam tahap ini, mahasiswa juga diajarkan mengenai struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (*APBD*) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (*APBDes*), yang merupakan instrumen utama dalam perencanaan keuangan daerah.

Untuk meningkatkan keterampilan mahasiswa dalam melakukan analisis anggaran, pelatihan juga membekali peserta dengan teknik dan strategi dalam menelaah serta mengevaluasi anggaran daerah. Selain itu, peserta diperkenalkan dengan platform *Opentender.net*, sebuah sistem pemantauan pengadaan barang dan jasa yang dapat

digunakan sebagai alat dalam mengawasi transparansi belanja daerah. Mahasiswa tidak hanya mendapatkan pemahaman teoritis, tetapi juga melakukan simulasi kasus menggunakan Opentender.net untuk mengasah kemampuan analisis mereka dalam mendeteksi potensi penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa di sektor publik.

Selama pelatihan, partisipasi aktif peserta terlihat dari interaksi yang terjadi dalam sesi diskusi, tanya jawab, serta permainan edukatif yang dirancang untuk menguji pemahaman mereka terhadap materi yang diberikan. Keaktifan peserta dalam menjawab pertanyaan dari pemateri menunjukkan adanya peningkatan pemahaman terhadap fungsi anggaran. Hal ini mengindikasikan bahwa pelatihan yang diberikan mampu meningkatkan kapasitas mahasiswa dalam memahami, menganalisis, serta mengawal proses perencanaan dan penganggaran daerah secara lebih kritis dan sistematis.

Implementasi Mahasiswa Sebagai Pengawas Partisipatif Anggaran

Mahasiswa, sebagai bagian dari pengawas partisipatif anggaran, dituntut untuk memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai anggaran daerah. Dengan pengetahuan yang mendalam, mereka dapat berperan aktif dalam mengawasi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran. Proses ini diharapkan dapat memperluas wawasan mahasiswa mengenai sumber anggaran serta mendorong keterlibatan mereka dalam advokasi kebijakan publik yang lebih baik.



Gambar 1: Pemaparan analisis anggaran dan pendapatan daerah
Sumber diolah penulis 2025

Secara tidak langsung, masyarakat memiliki peran penting dalam penerimaan pendapatan daerah melalui berbagai sumber, seperti pajak, retribusi, laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pinjaman atau utang, serta dana hibah. Pendapatan yang diperoleh dari berbagai sumber ini kemudian digunakan sebagai landasan utama dalam pembiayaan pembangunan daerah dan penyediaan layanan publik.

Negara hadir sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam mengelola keuangan yang dipungut dari rakyat. Salah satu tujuan utamanya adalah menjamin hak-hak rakyat agar mereka mendapatkan akses yang layak terhadap berbagai layanan publik. Selain itu, negara juga berperan dalam menciptakan keteraturan sosial melalui regulasi yang mengatur distribusi anggaran, sehingga setiap sektor memperoleh alokasi dana yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pemerintah memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan layanan publik yang berkualitas guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini mencakup berbagai

sektor, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta berbagai layanan sosial lainnya yang berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup rakyat. Dengan adanya sistem pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel, negara dapat memastikan bahwa pendapatan daerah digunakan secara efektif dan tepat sasaran.

Oleh karena itu, peran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi harus diimbangi dengan sistem pengelolaan anggaran yang baik oleh pemerintah. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sangat bergantung pada bagaimana negara mengalokasikan dan memanfaatkan pendapatan daerah untuk kepentingan publik secara adil dan berkelanjutan.

Mahasiswa berperan aktif dalam kegiatan ini dengan berpartisipasi secara langsung dalam proses pembelajaran dan diskusi mengenai berbagai sumber anggaran. Mereka tidak hanya mendengarkan pemaparan materi dari narasumber, tetapi juga terlibat dalam tanya jawab serta analisis kritis terhadap bagaimana anggaran daerah dihimpun dan dikelola. Dalam diskusi, mahasiswa membahas peran pajak, retribusi, laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pinjaman, serta dana hibah sebagai komponen utama pendapatan daerah. Partisipasi aktif ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang mekanisme keuangan publik serta pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah.



Gambar 2: Analisis partisipatif mahasiswa terhadap anggaran daerah
Sumber diolah penulis 2025

Pelatihan membaca dan menganalisis anggaran daerah, mahasiswa berpartisipasi aktif sehingga mereka benar-benar memahami sumber-sumber anggaran. Narasumber menekankan pentingnya pengetahuan tentang anggaran, mengingat anggaran daerah sering kali menjadi objek korupsi oleh pejabat, yang pada akhirnya menghambat masyarakat untuk merasakan manfaat penuh dari anggaran yang seharusnya dialokasikan demi kesejahteraan rakyat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berpotensi mendukung pengentasan kemiskinan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) per Juli 2022 mencatat bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 9,54% dari total populasi, dengan angka kemiskinan di pedesaan sebesar 14,43%. Memasuki tahun 2022, kemiskinan massal di Indonesia masih menjadi tantangan yang belum sepenuhnya teratasi. Kemiskinan di perkotaan maupun pedesaan tidak semata-mata disebabkan oleh kurangnya modal agregat, tetapi lebih banyak dipengaruhi oleh ketimpangan dalam penguasaan aset dan

faktor produksi, terbatasnya akses masyarakat miskin terhadap kebijakan penganggaran, serta desain program anti-kemiskinan yang sering kali hanya bisa diakses oleh mereka yang telah dikategorikan sebagai miskin. Ketiga faktor ini berkaitan erat dengan tata kelola anggaran daerah. Oleh karena itu, paradigma anggaran yang berpihak pada rakyat miskin (pro-poor budget) menjadi semakin penting dan mendesak.

Anggaran pro-poor adalah suatu gagasan yang menekankan pentingnya kebijakan pembangunan yang berpihak pada masyarakat miskin. Konsep ini mencakup praktik penyusunan kebijakan anggaran yang secara sengaja dirancang untuk menghadirkan program, proyek, dan kebijakan yang mengutamakan kepentingan masyarakat miskin. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi hak-hak dasar kelompok masyarakat yang kurang mampu. Substansi anggaran pro-poor memiliki kesamaan dengan konsep people-oriented budget, yaitu anggaran yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar rakyat.

Prinsip-prinsip anggaran pro-poor meliputi pengelolaan anggaran yang transparan, akuntabel, dan partisipatif; melibatkan publik dalam seluruh aspek penyusunan dan pelaksanaan kebijakan anggaran; menerapkan prinsip keadilan anggaran yang mencakup efisiensi, efektivitas, ekonomi, serta pemerataan (equity); serta berbasiskan indikator kinerja yang jelas dan terukur dalam setiap program, proyek, dan kegiatan.

Mahasiswa juga diberikan pemahaman mengenai siklus perencanaan dan penganggaran daerah, mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), hingga Rencana Kerja (RENJA). Mahasiswa juga diperkenalkan dengan berbagai dokumen perencanaan dan penganggaran daerah. APBD sendiri merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Tahun anggaran APBD berlangsung selama satu tahun, dimulai dari 1 Januari hingga 31 Desember.



Gambar 3: Pemaparan siklus perencanaan dan penganggaran

Mahasiswa diberikan kesempatan untuk memahami dan menjelaskan siklus perencanaan dan penganggaran yang berlangsung dari bulan Januari hingga Desember. Pembelajaran ini dilakukan dalam lima kelompok yang masing-masing bertugas

menjelaskan tahapan mulai dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat desa/kelurahan hingga penetapan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Selain itu, mahasiswa juga menilai sejauh mana keterlibatan masyarakat dalam proses ini, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang.

Dalam teori, partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan penganggaran harus mencakup seluruh tahapan mulai dari Musrenbang desa/kelurahan, Musrenbang kecamatan, Forum OPD, Rencana Kerja OPD, hingga Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat umumnya hanya terjadi hingga tingkat Musrenbang kecamatan. Setelah itu, hanya segelintir individu yang berpartisipasi dalam tahapan lebih lanjut hingga Musrenbang RKPD. Fenomena ini menciptakan permasalahan serius terkait transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah.

Salah satu hambatan utama dalam pembangunan daerah adalah pengelolaan keuangan yang belum optimal. Akibatnya, sektor-sektor penting seperti pendidikan, kesejahteraan masyarakat miskin, dan dukungan bagi penyandang disabilitas mengalami perlambatan. Beberapa faktor yang menyebabkan permasalahan ini antara lain:

1. Rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang mengakibatkan ketergantungan tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.
2. Formula kebijakan pajak dan retribusi daerah yang belum optimal dalam meningkatkan pendapatan.
3. Kesulitan dalam mengelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), sehingga potensi sumber pendapatan daerah tidak dimanfaatkan secara maksimal.
4. Dana Alokasi Umum (DAU) yang lebih banyak digunakan untuk belanja pegawai, mengurangi fleksibilitas dalam membiayai program pembangunan daerah.
5. Dana Alokasi Khusus (DAK) yang belum mampu merespons kebutuhan daerah secara efektif, khususnya dalam penyediaan pelayanan publik.
6. Permasalahan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana dekonsentrasi, dana tugas pembantuan, dana hibah, dan dana pinjaman daerah, yang menyulitkan efektivitas penggunaan dana-dana tersebut dalam mendukung pelayanan publik dan pengentasan kemiskinan.

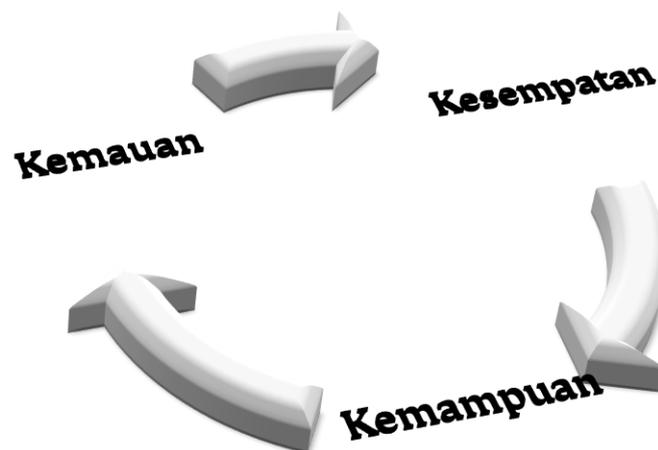
Selain itu, dalam banyak kasus, alokasi anggaran dalam APBD masih menunjukkan proporsi belanja aparatur yang lebih besar dibandingkan belanja publik. Proses penyusunan dan pelaksanaan APBD juga sering dikritik karena kurangnya partisipasi warga, terutama dari kelompok masyarakat miskin. Hal ini diperparah dengan:

1. Lemahnya penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, dan pengelolaan aset daerah, yang sering kali tidak berada di bawah kontrol publik.
2. Monitoring dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah yang belum berjalan efektif, baik karena kinerja lembaga pengawasan internal yang belum optimal maupun karena peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam fungsi budgeting yang masih terbatas.

3. Kurangnya keterlibatan masyarakat sipil dalam pemantauan pengelolaan keuangan daerah, yang turut berkontribusi pada gagalnya pengelolaan keuangan sebagai instrumen dalam pengentasan kemiskinan dan penciptaan kesejahteraan di daerah.

Meskipun perencanaan dan penganggaran daerah telah memiliki kerangka regulasi yang jelas, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Partisipasi masyarakat yang terbatas, ketidakseimbangan alokasi anggaran, serta lemahnya transparansi dan akuntabilitas menjadi kendala utama dalam pengelolaan keuangan daerah. Sebagai implikasi kebijakan, diperlukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam seluruh tahapan perencanaan dan penganggaran, memperbaiki manajemen keuangan daerah, serta memperkuat sistem pengawasan internal dan eksternal. Dengan demikian, pengelolaan keuangan daerah dapat menjadi lebih efektif dalam mendukung pembangunan daerah, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Partisipasi masyarakat dan mahasiswa sangat dibutuhkan dalam pengelolaan keuangan di daerah. Oleh karena itu, penting bagi mereka untuk terlibat aktif dalam proses tersebut. Untuk mendukung partisipasi yang efektif, perlu diketahui unsur-unsur penting dalam partisipasi dan dapat dipahami melalui gambar berikut.



Gambar 4: Unsur partisipasi dalam pengelolaan keuangan daerah

Partisipasi yang efektif hanya dapat terjadi jika tiga unsur utama terpenuhi, yaitu kesempatan, kemampuan, dan kemauan. Kesempatan mencerminkan akses yang diberikan kepada masyarakat dan mahasiswa untuk terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah, sementara kemampuan berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan yang

diperlukan agar partisipasi dapat berjalan secara optimal. Selain itu, kemauan menjadi faktor penentu sejauh mana individu atau kelompok berinisiatif untuk berkontribusi dalam proses tersebut. Jika salah satu dari ketiga unsur ini tidak terpenuhi, maka partisipasi tidak dapat terwujud secara penuh, yang pada akhirnya dapat menghambat transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas pengelolaan keuangan daerah dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa mahasiswa FISIP Universitas Bosowa masih memiliki pemahaman yang terbatas terkait anggaran daerah, termasuk siklus anggaran, pendapatan dan belanja daerah, serta proses perencanaan dan penganggaran. Kurangnya pemahaman ini menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas akademik dan praktis bagi mahasiswa dalam bidang keuangan daerah. Dengan adanya pelatihan yang diberikan, mahasiswa dapat meningkatkan pengetahuan dan kompetensinya, tidak hanya dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran, tetapi juga dalam aspek pengawasan barang dan jasa melalui platform *Opentender.Net*. Hal ini diharapkan dapat membentuk generasi yang lebih kritis, transparan, dan kompeten dalam mendukung tata kelola keuangan daerah yang lebih baik di masa depan..

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Irfan, Muh. Nasir Hamzah, and Didiharyono Didiharyono. 2023. "Analisis Good Governance Dan Kualitas Pegawai Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Melalui Kejelasan Sasaran Anggaran Pada Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan." *Jurnal Sains Manajemen Nitro* 2(2):138–52. doi: 10.56858/jsmn.v2i2.161.
- Anwar, Anwar, and Muh. Satriawan S. 2022. "PERAN INSPEKTORAT SEBAGAI BADAN PENGAWASAN ANGGARAN DAERAH (Studi Kasus Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Parepare)." *Journal AK-99* 1(2):55–63. doi: 10.31850/ak99.v1i2.1449.
- Hertati, Lesi. 2021. "PENGARUH TINGKAT PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI." *JRAK (Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis)* 7(2):59–70. doi: 10.38204/jrak.v7i2.560.
- Hutagalung, Edward. 2016. "PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH." *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja* 42(1):1. doi: 10.33701/jipwp.v42i1.137.
- Kurniawan, Ahid Wahyu, and Yulita Nilam Fridiyanti. 2023. "ANALISIS ANGGARAN DAERAH RESPONSIF GENDER (Studi Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pati Tahun 2018)." *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 9(2):203–20. doi: 10.25157/moderat.v9i2.3110.

- Mustofa, Viki, Widya Eka Putri Anggraini, Elsa Uliya Putri, and Mundhori Mundhori. 2024. "Analisis Pentingnya Monitoring Dan Pengawasan Lapangan Dalam Pembiayaan Bank Syariah." *Al-Muraqabah: Journal of Management and Sharia Business* 4(2):244-60. doi: 10.30762/al-muraqabah.v4i2.2018.
- Nasir, Yuslinaini, A. Hamid, Zulfan Yusuf, and Zakaria. 2023. "Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah Dan Alokasi Anggaran Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kota Banda Aceh." *Jurnal EMT KITA* 7(3):676-83. doi: 10.35870/emt.v7i3.1199.
- Nurakhmadi, Dito Arief, Triya Indra Rahmawan, and Saring Suhendro. 2024. "Optimalisasi Partisipasi Masyarakat Dalam Penganggaran." *Peradaban Journal of Law and Society* 3(1):48-62. doi: 10.59001/pjls.v3i1.173.
- Rahmawati, Rahmawati. 2023. "Analisis Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Berau." *Jesya* 6(1):794-803. doi: 10.36778/jesya.v6i1.1019.
- Riwukore, Jefirstson Richset, Fellyanus Habaora, and Terttiaavini Terttiaavini. 2022. "Good Governance Dalam Mengukur Kinerja Lembaga Negara (Review)." *Jurnal Pemerintahan Dan Politik* 7(1). doi: 10.36982/jpg.v7i1.1974.
- Saraswati, Esti. 2021. "Peranan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah 'Rumah Kreatif BUMN' Purbalingga." *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4(01):26-33. doi: 10.25134/empowerment.v4i01.4044.
- Sari, Meita Sekar, and Martin Palupi. 2014. "PENGARUH PARTISIPASI ANGGARAN, KEJELASAN SASARAN ANGGARAN DAN EVALUASI ANGGARAN TERHADAP KINERJA DINAS PERTANIAN PROVINSI LAMPUNG." *Fiat Justisia* 8(4):584-94.
- Simanjuntak, Kardin. 2015. "Implementasi Kebijakan Desentralisasi Pemerintahan Di Indonesia." *Jurnal Bina Praja* 07(02):111-30. doi: 10.21787/jbp.07.2015.111-130.
- Sunarto, Sunarto. 2018. "PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DPR (Perbandingan Antara Era Orde Baru Dan Era Reformasi)." *Integralistik* 29(1):13. doi: 10.15294/integralistik.v29i1.14604.
- Syam, M. Ardiansyah, Suratno Suratno, and Syahril Djaddang. 2021. "Literasi Tatakelola BUMDES (Badan Usaha Milik Desa)." *CAPACITAREA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1(02):67-79. doi: 10.35814/capacitarea.2021.001.02.06.
- Tameon, Alwin Fedianto, Sarinah Joyce M. Rafael, and Linda Lomi Ga. 2023. "ANALISIS KINERJA ANGGARAN MENUNAKAN METODE VALUE FOR MONEY PADA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR PERODE 2017-2021." *JURNAL AKUNTANSI: TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS* 11(1):40-50. doi: 10.35508/jak.v11i1.10250.
- Yuniarti, Titi. 2020. "MOTIVASI KERJA DAN KINERJA AUDITOR TERHADAP TEKANAN ANGGARAN WAKTU, KOMPLEKSITAS TUGAS, DAN ANGGARAN (SUATU KAJIAN STUDI LITERATUR MANAJEMEN DAN KEUANGAN)." *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan* 2(2):233-51. doi: 10.31933/jimt.v2i2.350.
- Yuniati, Helma, and Anne Putri. 2023. "Analisis Pengaruh Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Lingkungan Birokrasi Terhadap Penyerapan Anggaran Pada Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh." *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)* 9(5):1886-99. doi: 10.35870/jemsi.v9i5.1498.

- Yuyud Susilo. 2020. "ANALISIS ANGGARAN SEBAGAI ALAT PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN INDRAMAYU (Studi Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2011 – 2015)." *SINAU : Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Humaniora* 1(01):35–68. doi: 10.37842/sinau.v1i01.4.
- Zhafiri, Rajendra Ghazian, and Sri Trisnaningsih. 2023. "Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Dinas Koperasi Dan UKM Provinsi Jawa Timur." *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)* 6(2):2436–45. doi: 10.31539/costing.v6i2.5941.